

EVALUASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KOTA TANJUNG PINANG

Ibrahim^{1(A)}, Adi Firmansyah^{2(b)}, Syaril Ramadhan^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

^{a)}190563201081@student.umrah.ac.id, ^{b)}190563201094@student.umrah.ac.id,

^{c)}190563201140@student.umrah.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

24-11-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

Evaluasi Perda, Kebersihan Lingkungan, Tempat Pembuangan Akhir

Keywords:

Evaluation of Regional Regulations, Environmental Cleanliness, Final Disposal Sites

Corresponding Author:

190563201081@student.umrah.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.519>

ABSTRAK

Kebersihan lingkungan merupakan masalah yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang. kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur mendasar dalam ilmu dan pencegahan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berperan penting dalam membuat kebijakan terkait permasalahan sampah tersebut. Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Metode dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan sesudah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, guna melihat antara tingkat capaian dan kegagalan.

ABSTRACT

Environmental cleanliness is a problem that is difficult to control by the local government of Tanjung Pinang City. Environmental cleanliness is an inseparable thing from human life and is a fundamental element in health science and prevention. In this case, the local government of Tanjungpinang City plays an important role in making policies related to the waste problem. When the terms policy and public are combined into one, that is, public policy, it has a broader meaning than when it is interpreted singly. The method in this paper uses a qualitative method, which is a research method used to examine the condition of natural objects, where the researcher is a key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation, data analysis is inductive, and the results of the study emphasize the meaning of generalizations. Policy evaluation is generally carried out after the public policy is implemented, in order to see between the level of achievement and failure.

PENDAHULUAN

Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota provinsi kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. mulai dari pengesahan kota tanjung pinang yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2002 yang ditandatangani oleh presiden megawati soekarno putri yang disahkan oleh DPR RI yang dilaksanakan dalam rapat pleno DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Seiring berjalannya waktu, kota Tanjung Pinang terus mengalami kemajuan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pendidikan. Kemajuan kota tanjung pinang tidak terlepas dari masalah lingkungan dan sosial.

Kebersihan lingkungan merupakan masalah yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang. Menurut Lastryah 2013, kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur mendasar dalam ilmu dan pencegahan kesehatan (Dwi et al., 2019). Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Tanjungpinang berperan penting dalam membuat kebijakan terkait permasalahan sampah tersebut. Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan (Handoyo, 2012).

Pada tahun 2021, total penduduk Kota Tanjungpinang sebanyak 227.069 jiwa, yang artinya semakin banyak penduduknya, semakin besar pula sampah yang dihasilkan, ditambah kebiasaan masyarakat Kota Tanjung Pinang yang tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Pemerintah kota tanjungpinang dalam hal ini mengeluarkan PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 tentang pengelolaan sampah di kota tanjung pinang yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di kota Tanjung Pinang. Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah mengatur penanganan permasalahan sampah dan segala dampaknya terhadap masyarakat yang harus dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis dengan pengelolaan yang baik dalam rangka menghindari pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin kebersihan lingkungan dan kesehatan

masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Upaya perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk meminimalisir permasalahan sampah di Kota Tanjung Pinang.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kota Tanjung Pinang sampai sekarang, tidak memiliki harapan. Implementasi Berarti memberikan sarana untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan dapat berdampak/berpengaruh terhadap sesuatu. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan penyimpanan sampah yang tersedia yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya. Ada masalah lain dalam pengelolaan sampah baik dalam pemusnahan sampah, pemilahan sampah menjadi barang baru, maupun pengomposan sampah. Kebijakan pemerintah kota tanjungpinang telah dibuat dan dilaksanakan mengenai pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan dimana kondisi di lapangan tidak sesuai dengan tata cara dalam kebijakan pemerintah daerah kota tanjung pinang.

Implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2009 perlu dilakukan evaluasi mendalam agar peraturan yang telah dibuat tersebut bisa mengatasi masalah sampah dan kebersihan lingkungan di kota tanjung pinang. Evaluasi yang dilakukan harus sistematis, terarah, dan efektif sehingga peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kota tanjung pinang sesuai dengan tujuan dan harapan. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian (Mahirah, 2017).

Dalam penulisan ini akan di jabarkan mengenai evaluasi sistem pengelolaan sampah di kota tanjung pinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan publikasi-publikasi yang berkaitan dengan kepenulisan ini yang diterbitkan di internet. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Pilendia, 2020).

Penelitian ini mengarah pada evaluasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di kota

tanjung pinang terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teori evaluasi, implementasi, serta sistem pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber internet. Metode dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian kualitatif tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh data-data yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan data-data yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas masyarakat di kota tanjung pinang tidak terlepas dari persoalan sampah. Sistem pengelolaan persampahan di kota tanjungpinang harus dilakukan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana yaitu meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas.

Pengelolaan sampah tanpa sistem persampahan yang tepat menjadi alasan tidak tercapainya lingkungan yang bersih, disebabkan sampah bertumpukan di jalan dengan tidak adanya tempat fasilitas. Kondisi pengelolaan sampah di kota Tanjung Pinang tahapan pengelolaan persampahan terdiri atas:

1) Pengumpulan

- a. Sistem pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan

hanya dilakukan pada kawasan permukiman di tepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah. Kondisi ini hampir dijumpai di seluruh kawasan permukiman.

- b. Keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sebelum diangkut ke TPA sering kali terjadi polemik, warga menolak penempatan TPS di depan rumah mereka.
- c. Jumlah kontainer sampah masih sangat terbatas, padahal timbunan sampah pasar sangat besar. Kekurangan mobil amrol mengakibatkan container sering terlambat diangkut ke TPA.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat rendah khususnya pengumpulan sampah. Hal ini bisa dijumpai dengan tidak adanya kelembagaan di tingkat masyarakat. Sistem pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman di tepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan mudah di angkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit di jangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah.

2) Pengangkutan

- a. Proses pengangkutan sampah berlangsung mulai dari TPS dan berakhir TPA. Sarana pengangkutan sampah Dinas kebersihan Kota Tanjungpinang jumlahnya sangat terbatas tidak sebanding dengan volume sampah dengan armada yang dimiliki.
- b. Kesejahteraan dan jaminan keselamatan kerja petugas pengangkut belum juga memadai, padahal ujung tombak di lapangan adalah tenaga pengangkut.
- c. Waktu pengangkutan sampah sering kali dilakukan pada puncak jam sibuk 05:00-08:00

3) Pemusnahan

- a. Pemusnahan sampah utama dilakukan di TPA. Walau terdapat peluang pemusnahan awal di hulu (di

permukiman) dengan sistem 3R ataupun sampah dipilah sebelum masuk TPA.

- b. TPA masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan karena menimbulkan bau dan vektor dari lalat dan tikus.
- c. Pembuatan pupuk kompos sebagai salah satu bentuk nilai ekonomis sampah dan cukup signifikan mengurangi volume sampah di TPA.
- d. TPA ganet merupakan salah satu tempat pemrosesan akhir sampah di kota tanjung pinang masih sering menimbulkan masalah bau yang terbawa angin hingga kawasan.

4) Pola Individual Langsung

Pengumpulan sampah dengan metode individual langsung yaitu, dilakukan oleh petugas kebersihan dengan jalan mendatangi tiap-tiap sumber dan langsung diangkut untuk di buang di tempat pembuangan akhir (TPA). Metode individual langsung biasanya melayani sumber sampah yang berada di sekitar batu 8 batu 10. Adapun peralatan yang dipergunakan adalah mobil dump truk bak sampah'.

5) Pola Individual Tidak Langsung

Pengumpulan sampah dengan metode individual tidak langsung merupakan metode pengumpulan sampah yang dilakukan warga atau petugas kebersihan yang mendatangi tiap tiap sumber sampah dan diangkut ke tempat penampungan sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Metode ini melayani sumber sampah yang berada di setiap jalan arteri sekunder.

Implementasi perda nomor 14 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kota tanjung pinang merupakan hal yang perlu dievaluasi agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Pelaksanaan Evaluasi perlukan di lihat dari beberapa aspek tertentu yang bertujuan untuk melihat seberapa besar keberhasilan implementasi dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Penulisan ini menggunakan teori william dunn tentang kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, ketepatan, dan responsivitas yang dijabarkan sebagai berikut:

Efektivitas

Evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan sesudah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, guna melihat antara tingkat

capaian dan kegagalan. Menurut H. Emmerson seperti yang dikutip Handyaningrat (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Apriliani & Maesaroh, 2021) Pengelolaan sampah di kota tanjung pinang khususnya di TPA ganet masih mencapai target. Hal tersebut dibuktikan masih kurang efektifnya pemusnahan sampah yang dilakukan oleh pihak pengelolaan sampah di TPA ganet sehingga sampah terus menumpuk dan bisa mencemari lingkungan.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan sejauh mana optimalnya usaha yang dilakukan, dinilai dari aspek biaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Secara definisi, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum (Cholik, 2013). Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan, khususnya di TPA [pola pengelolaan sampah diangkut dan ditimbun di TPA 69 persen, dikubur 10 persen, di kompos dan didaur ulang 7 persen, dibuang ke sungai 5 persen, dan sisa nya tidak dikelola 7 persen.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi TPA adalah landfill mining. Cara ini tidak hanya menata ulang TPA, tetapi juga memanfaatkan kembali material yang ada dalam timbunan, termasuk mengekstraksi gas metan.



Gambar 1. Cara Rehabilitasi TPA

Sumber:

<https://batam.tribunnews.com/2014/10/31/olah-sampah-jadi-gas-methan-15-kk-di-tanjungpinang-tak-perlu-beli-lpg>

Korlap TPA ganet Tanjungpinang dan anggotanya menunjukkan genset berbahan bakar gas metan yang mampu memproduksi gas metan yang menjadi bahan bakar genset dengan daya 10,000 kilowatt

Kecukupan

Kriteria kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dapat menjawab persoalan-persoalan atau penyelesaian terhadap suatu masalah yang terjadi. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Akbar, 2016).

Dalam hal ini beberapa persoalan yang muncul perlahan mulai diselesaikan dari beberapa program yang telah dibuat seperti daur ulang sampah menjadi kompos yang memiliki dampak baik yaitu berkurangnya sampah organik yang ada di TPA ganet.

Perataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik (Natika & Putri, 2021). Perataan berkaitan dengan pendistribusian terhadap pengelolaan sampah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Sistem pengelolaan sampah di TPA Ganet masih menggunakan sistem landfill mining atau penambangan sampah bertujuan untuk mengurangi sampah yang sudah tertimbun. Memulihkan atau recovery material agar dapat dimanfaatkan kembali, hingga memperoleh lahan baru, namun demikian masih perlu proses pengkajian untuk menerapkan teknologi tersebut.

Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria yang sangat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena ketepatan kebijakan tidak berkaitan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama-sama. Ketepatan lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut (Pbb et al., n.d.).

Di TPA Ganet pengelolaan sampah menjadi gas metan untuk dijadikan bahan bakar genset, cara ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global secara signifikan. Dan manfaat lainnya yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

Responsivitas

Responsivitas adalah suatu kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan profesi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini sangat penting karena analisis yang

dapat memuaskan semua kriteria lainnya, efektivitas, kecukupan, pemerataan.

Penerapan atau kebijakan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum tercapai dari pencapaian sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan belum dilaksanakan sesuai target dan sasaran yang dicapai (Hidayu et al., 2021). Responsivitas dalam pengelolaan sampah di TPA ganet masih belum bisa dibilang responsif, hal tersebut dikarenakan masih banyak masalah yang sering terjadi seperti, penimbunan sampah yang berlebihan, dan pemusnahan sampah tidak dilakukan dengan responsif dan efektif sehingga masih menimbulkan masalah kesehatan salah satunya adalah tercemarnya udara sekitar akibat dari bau sampah tersebut.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah kota tanjungpinang telah dibuat dan dilaksanakan mengenai pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan dimana kondisi di lapangan tidak sesuai dengan tata cara dalam kebijakan pemerintah daerah kota tanjung pinang. Menurut H. Emmerson seperti yang dikutip Handyaningrat (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan sampah di kota tanjung pinang khususnya di TPA ganet masih mencapai target. Hal tersebut dibuktikan masih kurang efektifnya pemusnahan sampah yang dilakukan oleh pihak pengelolaan sampah di TPA ganet sehingga sampah terus menumpuk dan bisa mencemari lingkungan.

Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan, khususnya di TPA pola pengelolaan sampah diangkut dan ditimbun di TPA 69 persen, dikubur 10 persen, di kompos dan didaur ulang 7 persen, dibuang ke sungai 5 persen, dan sisa nya tidak dikelola 7 persen. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam hal ini beberapa persoalan yang muncul perlahan mulai diselesaikan dari beberapa program yang telah dibuat seperti daur ulang sampah menjadi kompos yang memiliki dampak baik yaitu berkurangnya sampah organik yang ada di TPA ganet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *metode penelitian kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV.Syakir Media Press.
- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2, 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Apriliani, D., & Maesaroh. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(1), 272–285.
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Dwi, D., Ambali, W., & Allo, L. B. Abdul Karim bin Abdul Latif. (2019). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dengan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019*. 15.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), *Semarang: Widya Karya*. Widya Karya Semarang.
- Hidayu, I., Setiawan, R., & Kurnianingsih, F. (2021). *Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (Rtl) Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang)* (Vol. 2, Issue 2017).
- Mahirah, B. (2017). Evaluasi belajar peserta didik (siswa). *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 257–267.
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(1), 26–38. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i1.1077>
- Pbb, B., Tinjau, D. I., Aspek, D., & Di, K. (n.d.). *Evaluation Of Achievements Of Taxes And Building (Pbb) Acceptance Achievements In The Review Of Accuracy Aspect In Pembataan Village , Tabalong Regency*. 2(2), 667–677.
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika : Studi Literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>